

**STRATEGI EKOSISTEM INDUSTRI PERTAHANAN  
UNTUK MEMENUHI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALPALHANKAM  
DALAM MENDUKUNG EKONOMI NASIONAL DITENGAH PANDEMI COVID-19**

**DEFENSE INDUSTRY ECOSYSTEM STRATEGY  
TO COMPLETE THE DOMESTIC COMPONENT LEVELS  
OF ALPALHANKAM IN SUPPORTING THE NATIONAL ECONOMY AMONG THE  
COVID-19 PANDEMIC**

Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama<sup>1</sup>, Khaerudin<sup>2</sup>, Timbul Siahaan<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI INDUSTRI PERTAHANAN/ FAKULTAS TEKNOLOGI  
PERTAHANAN/UNIVERSITAS PERTAHANAN

[hanief.baihaqqi@gmail.com](mailto:hanief.baihaqqi@gmail.com) [khaerudinsyahid@yahoo.com](mailto:khaerudinsyahid@yahoo.com) [timbulsiahaan57@yahoo.com](mailto:timbulsiahaan57@yahoo.com)

**Abstrak** - Pemberdayaan industri pertahanan nasional adalah suatu upaya untuk membantu pemenuhan Alutsista dari dalam negeri melalui pengadaan. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan besarnya nilai komponen dalam negeri yang digunakan pada barang, jasa, dan gabungan keduanya untuk menghasilkan suatu produk. Ekosistem industri pertahanan dimaksudkan untuk menimbulkan penambahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena interaksi yang terjadi antar industri dalam negeri menyebabkan adanya arus bahan baku dalam memproduksi Alpalhankam. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemenuhan TKDN dalam memproduksi maupun pengadaan Alpalhankam diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam serta menganalisis strategi yang tepat sehingga dapat mendukung perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi dan wawancara kepada stakeholder terkait. Analisa data dimulai dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan TKDN industri pertahanan dengan cara membeli bahan baku dari industri pertahanan dalam negeri mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dapat diatasi. Untuk itu diperlukan strategi untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam, antara lain melalui sinkronisasi antar tier supaya bersinergi antara BUMN dan BUMS, harmonisasi antara industri pertahan dengan user yang diharapkan dapat membangun suatu permintaan yang baik dari dalam negeri, serta penguasaan teknologi yang didorong dengan bentuk kerjasama asing dengan harapan dapat membantu menurunkan current account deficits. Alpalhankam yang sudah dibuat pun harus memiliki nilai komersialisasi agar laku di pasar sehingga kemandirian dan daya saing industri pertahanan juga dapat terwujud

**Kata kunci** : Alpalhankam, Industri Pertahanan, pandemi Covid-19, TKDN.

**Abstract** - Empowerment of the national defense industry is an effort to assist the fulfillment of domestic defense equipment through procurement. The Domestic Component Level or “Tingkat Komponen Dalam Negeri” (TKDN) is the value of the domestic components used in goods, services, and a combination of the two to produce a product. The defense industry ecosystem is intended to cause an increase in the Domestic Component Level (TKDN) because the interactions that occur between domestic industries cause a flow of raw materials in producing Alpalhankam. During the Covid-19 pandemic, an economic Indonesian slowdown which had an impact on national economic growth. Through the fulfillment of TKDN in producing and procuring Alpalhankam, it is hoped could be one of the way to support the national economy during Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to analyze the defense industry ecosystem in fulfilling TKDN Alpalhankam and analyze the right strategy so that it can support the national economy in the midst of the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was carried out through literature studies, observation and interviews with related stakeholders. Data analysis begins with data collection, data condensation, data presentation and conclusions. The results showed that to fulfill the TKDN of the defense industry by buying raw materials from the domestic defense industry were able to move the wheels of the economy so that national economic growth during the Covid-19 pandemic could be overcome. For this reason, a strategy is needed to create a defense industry ecosystem in fulfilling the TKDN of Alpalhankam, including through synchronization between tiers so that the synergy between BUMN and BUMS, harmonization between the defense industry and users to build a good demand from within the country, technology mastery that is driven with a form of foreign cooperation in order to reduce the current account deficits. At the last, Alpalhankam should be have commercialization value in order to sell in the market, so that the independence and competitiveness of the defense industry could be realized.

**Keywords:** Alpalhankam, Covid-19 pandemic, Defense Industry, TKDN

## **Pendahuluan**

Industri pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), baik secara sendiri maupun perorangan. Sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah, industri pertahanan melakukan tugasnya untuk menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dan jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan (UU No. 16 Th. 2012 pasal 1 ayat 1). Pada pelaksanaannya, industri

pertahanan sebagai industri nasional baik milik negara maupun swasta yang mendukung pengembangan kemampuan teknologi serta rencana pengembangan industri, berpedoman pada kebutuhan pengguna sesuai dengan postur pertahanan negara. Industri pertahanan merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pemenuhan MEF. Pemberdayaan industri pertahanan nasional, yaitu untuk membantu pemenuhan Alutsista dari dalam negeri melalui pengadaan.

Ekosistem industri pertahanan berarti mengadaptasi analogi ekosistem

kedalam industri pertahanan. Tingkatan-tingkatan pada setiap industri pertahanan dalam ekosistem saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk membentuk sistem kesatuan yang luas. Sehingga dalam Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan sudah diatur tingkatan peran dan tugasnya mulai dari tier 2 sebagai lead integrator, hingga tier 4 sebagai penyuplai bahan baku paling awal. Antara komunitas industri pertahanan dengan lingkungannya selalu terjadi interaksi yang menciptakan kesatuan dan dapat disebut dengan ekosistem industri pertahanan. Pengembangan setiap produk dari industri pertahanan harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan ekosistem secara holistik, yaitu pembangunan secara berkelanjutan.

Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk selanjutnya disingkat dengan TKDN sudah diatur oleh menteri perindustrian Republik Indonesia dan dibukukan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan keduanya. Komponen dalam negeri pada barang adalah

penggunaan bahan baku, rancangan bangun dan rekayasa yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan dalam negeri. Sedangkan komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja yang di dalamnya tergolong juga perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian dunia terhambat karena berbagai sektor mengalami gangguan. Hal tersebut juga dirasakan oleh negara Indonesia yang mengalami perlambatan ekonomi pada awal tahun 2020 karena dampak dari pandemi Covid-19. Dalam proyeksi perekonomian Indonesia, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi kebawah pada nilai -0,4 persen hingga 2,3 persen dengan pertimbangan terjadinya perlambatan hampir pada semua komponen PDB. Hasil realisasi pertumbuhan pada triwulan I tahun 2020 yang melambat signifikan menjadi

sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 melambat mendekati nol dengan puncaknya pada triwulan II tahun 2020 (Bappenas, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam mengukur pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemerintah memiliki peran besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut ditunjukkan oleh pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (Ma'ruf dan Wihatuti, 2008).

Menurut Todaro dan Smith, Pemerintah memiliki tiga fungsi utama

dalam mendukung perekonomian antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti infrastruktur dan fasilitas umum

Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah sehubungan dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak. Kebijakan fiskal juga dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui merubah-rubah penerimaan negara dan atau pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup kebijakan, yaitu pada sektor pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak sehingga disebut juga sebagai kebijakan anggaran. Secara umum tujuan dari kebijakan fiskal yang

ingin dicapai antara lain: peningkatan pendapatan nasional, peningkatan kesempatan kerja, penurunan laju inflasi, penurunan defisit neraca perdagangan, penurunan defisit neraca pembayaran internasional (Ma'ruf dan Wihatuti, 2008).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis eksplanasi yang menjabarkan penjelasan dari tujuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis triangulasi dan teknik analisis Miles and Huberman. Teknik analisis triangulasi digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik analisis Miles & Huberman digunakan dalam menyusun dan mengelompokkan data penelitian.

### **Tahapan Penelitian**

Desain penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain adalah sebagai berikut ini:

a) Tahap identifikasi dan perumusan masalah dari latar belakang yang

menjabarkan tentang ekosistem industri pertahanan saat ini serta bagaimana pencapaian TKDN alpalhankan yang dilakukan sehingga menunjang perekonomian nasional.

b) Tahap studi literatur-literatur yang berhubungan dan menjabarkan permasalahan pemenuhan TKDN Alpalhankam.

c) Tahap pengumpulan data terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam yang diperoleh melalui observasi, studi literatur dan dokumen terkait, serta melakukan wawancara pada narasumber yang berasal dari instansi-instansi stakeholders industri pertahanan.

d) Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis Miles & Huberman untuk mendapatkan data yang menggambarkan kesenjangan (Gap) yang ada pada ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam.

e) Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tentang ekosistem industri yang menggambarkan sinergi industri pertahanan negara, TKDN

Alpalhankam, dan perekonomian nasional ditengah pandemi Covid-19.

- f) Tahap perumusan konsep pemenuhan TKDN Alpalhankam yang ideal dalam ekosistem industri pertahanan untuk mendukung perekonomian nasional.
- g) Tahap kesimpulan dan pemberian rekomendasi dari hasil penelitian baik kepada para stakeholders berdasarkan sudut pandang dari akademisi, maupun kepada peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang industri pertahanan.

### **Subjek Penelitian**

Menurut Arikunto (2006), subyek penelitian adalah benda, hal atau orang yang menjadi tempat data untuk variable penelitian yang melekat dan merupakan pokok dari permasalahan dalam penelitian. Subjek penelitian juga mencakup seluruh informan atau narasumber yang ditunjuk atas kapasitasnya sebagai sumber data primer dalam penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah mereka para stakeholder pemangku kewenangan dalam menentukan kebijakan baik kebijakan operasional maupun kebijakan

umum mengenai ekosistem industri pertahanan untuk memenuhi TKDN Alpalhankam dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional. Subyek penelitian ini dipilih berdasarkan purposive dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai dengan topik yang akan diteliti. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah pertimbangan akan seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau seseorang tersebut sebagai pemangku kepentingan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Stakeholder yang berwenang dalam hal ini yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Kementerian Perindustrian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berhubungan erat dengan Pemenuhan TKDN Alpalhankam dalam peningkatan ekonomi nasional.

### **Hasil dan Pembahasan**

Ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam menjadi salah satu cara dalam

mendukung ekonomi nasional. Ekosistem industri atau dapat dikenal juga dengan ekologi industri merupakan pertukaran barang, jasa, maupun teknologi antara sektor industri dimana hal ini akan menciptakan bentuk kejasama dan imbal balik dalam sebuah kawasan industri (Santoso, 2014). Pada dasarnya ekosistem industri merupakan bagian dari pendekatan manajemen lingkungan dimana suatu sistem tidak dapat dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya tetapi merupakan bagian utuh yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material suatu bahan baku yang diproses menjadi suatu produk. Ekosistem industri dirancang sedemikian rupa agar suatu sistem dapat berinteraksi antar industri menyerupai ekosistem yang ada di alam, sehingga interaksi yang terjadi antar industri dapat berlangsung secara maksimal.

Ekosistem industri tidak hanya menghubungkan antar pelaku industri sehingga dapat bekerjasama dalam menciptakan produk, akan tetapi ekosistem industri terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Elemen-elemen tersebut diantaranya adalah lapangan industri bisnis,

pemerintah, sentra pengembangan industri kecil, lembaga riset atau sekolah, akademi teknik, masyarakat, media, dan lembaga pembiayaan. Jika ekosistem industri berjalan dengan baik, maka setiap ekosistem industri pertahanan berarti memiliki keterikan antar elemen-elemen dalam sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan produk pertahanan. Elemen tersebut berupa industri pertahanan yang saling berinteraksi menyerupai ekosistem dalam menghasilkan produk pertahanannya. Produk pertahanan itu sendiri banyak kita kenal dan umum di dengar sebagai Alpalhankam. Penerapan ekosistem industri pertahanan ini diimplementasikan juga dalam klaster industri pertahanan sehingga terciptanya saling keterkaitan dan saling mendukung antara industri hulu dan industri hilir. Industri pertahanan hulu berarti berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi. Sedangkan industri pertahanan hilir berarti yang mengelola barang setengah jadi tersebut menjadi produk jadi seutuhnya. Contoh nyata terlihat di Indonesia dalam ekosistem industri pertahanan dengan bentuk industri hulu adalah pengolahan baja oleh PT. Krakatau

Steel. Baja-baja tersebut dibutuhkan oleh PT. Pindad dalam pembuatan kendaraan tempur semisal Anoa 6x6 (Wibowo, 2016).

### **Kondisi Ekosistem Industri Pertahanan**

Menurut Bappenas, konsep industri pertahanan bukan hanya sebagai peningkatan kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bentuk pendorong pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya industri pertahanan diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, penekanan yang dilakukan bukan hanya sekedar pemenuhan alutsista tetapi harapannya dapat menurunkan Current Account Deficits. Saat ini pembelian alutsista masih banyak dari luar negeri sehingga lebih banyak menyedot dollar, dengan adanya industri pertahanan dalam negeri diharapkan dapat menurunkan Current Account Deficits sehingga dollar tidak banyak keluar dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan industri pertahanan dimaksudkan agar Indonesia dapat meningkatkan perdagangan melalui global supply chain sehingga dapat menjadi bagian dari industri pertahanan global. BUMN dan BUMN diharapkan

dapat berperan aktif tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri sebagai bagian dari supply chain.

Bappenas menyusun roadmap bersama dengan KKIP dalam pengembangan industri pertahanan. Walaupun belum dituangkan dalam dokumen resmi berupa perpres atau keputusan ketua KKIP, namun sudah dalam proses pembentukan roadmap Industri pertahanan. Bappenas berperan sebagai penyeleksi produk Alpalhankam yang sudah diproduksi Indonesia, tidak boleh diadakan dari luar negeri. Pembiayaan ini dilakukan dengan rupiah murni dan pinjaman dari dalam negeri dengan tujuan pemerosesan dari dalam negeri. Jika tidak bisa maka pembiayaan dilakukan dari luar negeri dengan syarat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dari dalam negeri.

Visi misi presiden yang berupa Nawacita, Bappenas menerjemahkan program itu kedalam dokumen perencanaan 5 tahun sehingga terbentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 termasuk di bidang pertahanan. Salah satu targetnya adalah pengembangan industri pertahanan yang menjadi program prioritas nasional. Indikator ini tercantum

dalam RPJM sehingga Bappenas bekerjasama dengan KKIP untuk mencapai target selama 5 tahun roadmap tersebut.

Dalam kebijakan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri, sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini industri militer turut berkembang dan mempengaruhi jenis industri-industri lainnya. Banyak komoditas bisnis nonmiliter yang saat ini justru dimulai dari industri militer. Pada berbagai negara seperti GPS, drone, dan lain sebagainya. Pola pikir seperti itu hendak ditanamkan untuk industri pertahanan dalam negeri yang seharusnya ikut turut melibatkan UKM dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Melalui upaya perlibatan sektor swasta dalam proyek Industri Pertahanan dalam negeri, maka diharapkan dalam memproduksi alutsista bisa menghasilkan produk yang memiliki banyak kandungan dalam negeri.

Mengacu pada Permenperin No. 16 tahun 2011, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap semua jenis barang dan

merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama. Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat kedua yang merupakan produk hasil dari produsen dalam negeri. TKDN barang tingkat kedua dinyatakan 100% komponen lokal apabila:

1. Barang tingkat kedua tersebut diproduksi di dalam negeri.
2. Biaya barang tingkat kedua berada di bawah 3% dari biaya barang produksi tingkat kesatu.
3. Akumulasi biaya seluruh barang tingkat kedua diperbolehkan maksimal 10% dari total biaya barang tingkat kesatu.
4. Selanjutnya apabila dalam penelusuran barang yang diadakan terdapat barang tingkat ketiga, yang dibuat dari dalam negeri, maka barang tingkat ketiga tersebut merupakan 100% komponen lokal.

Pemerintah menetapkan APBN sebesar Rp127 triliun pada tahun 2020 untuk diarahkan ke industri pertahanan dengan tujuan rencana jangka panjang agar dapat berinvestasi dan menjadi lebih terarah (Humas Kemensetneg, 2020). Besarnya anggaran tersebut jika dibandingkan dengan belanja negara

pada tahun 2020 dengan total Rp 2.540,4 triliun merupakan angka yang cukup berpengaruh. Dari total keseluruhan belanja negara tersebut, 1.683,5 triliun merupakan belanja pemerintah pusat dan 856,9 triliun diarahkan ke dana desa (Kemenkeu, 2020). APBN yang diarahkan ke industri pertahanan merupakan bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa APBN untuk industri pertahanan sebesar Rp 127 triliun mempengaruhi perekonomian nasional sebesar 7,54% dari total belanja pemerintah pusat. Jika dibandingkan dengan total belanja negara pada tahun 2020, maka dapat diasumsikan anggaran untuk industri pertahanan berpengaruh terhadap perekonomian nasional sebesar 4,99% dari total APBN belanja negara.

Pada dasarnya, kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dijalankan dalam negeri harus turut memperkuat industri pertahanan nasional. Bersamaan dengan hal itu, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri

tersebut. Untuk membentuk ekosistem industri pertahanan yang baik, yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan, diperlukan ketersambungan dengan industri komponen lainnya baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor.

### **Strategi Ekosistem Industri Pertahanan**

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan

PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Kebijakan fiskal dalam masa pandemi Covid-19 diarahkan utamanya pada dua hal. Pertama, dukungan fiskal untuk upaya penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi. Kedua, dukungan terhadap upaya pemulihan dunia usaha. Kebijakan pertama diatur melalui Peraturan Menkeu (PMK) nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa jenis barang di antaranya obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, pendeteksi, pelindung diri, dan peralatan pendukung lainnya; serta jasa seperti jasa konstruksi, konsultasi, teknik, dan manajemen; mendapatkan fasilitas pembebasan pajak baik PPH maupun PPN.

Kebijakan yang mengatur pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mengikuti Permenperin No. 16 tahun 2011 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, produk dalam negeri adalah barang/ jasa termasuk rancang bangun dan

perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.

Sebagai langkah awal dalam mendukung ekonomi nasional pada masa pandemi ini adalah melalui kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Secara umum terdapat dua strategi bisnis yang berbeda secara fundamental, yakni differentiation and cost leadership. Kedua jenis strategi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai patokan dalam membuat kebijakan yang harus diambil. Yaitu adalah sebagai berikut:

#### 1. Differentiation Strategy

Strategi diferensiasi ini memungkinkan perusahaan untuk berusaha menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan daripada nilai yang diciptakan pesaing, dengan memberikan produk atau layanan dengan fitur unik sambil menjaga biaya pada tingkat yang sama atau serupa, memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi kepada pelanggannya.

Pada strategi ini, upaya menciptakan ekosistem industri pertahanan guna meningkatkan TKDN dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antara user/ TNI dengan stakeholder maupun industri pertahanan. Dalam hal ini TNI sebagai user diharuskan untuk membangun konsep dan doktrin operasi TNI dalam menyesuaikan dengan perubahan teknologi pertahanan. Dengan demikian, maka diharapkan TNI sebagai bagian dari unsur ekosistem

industri pertahanan ini menjadi aktor utama sehingga harus bisa memberikan point kemana ekosistem pertahanan ini akan mengarah.

#### 2. Cost-leadership Strategy

Dengan strategi kepemimpinan biaya, perusahaan berusaha untuk menciptakan nilai yang sama atau serupa bagi pelanggan dengan memberikan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah daripada pesaing, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya.

Pada strategi ini, upaya menciptakan ekosistem industri pertahanan guna meningkatkan TKDN dapat dilakukan dengan memperbanyak komersialisasi produk industri pertahanan. Pada pembahasan sebelumnya, Teknologi menjadi poin penting dalam pembuatan inovasi pada siklus ekosistem industri pertahanan. Pemerintah sebagai pihak government telah memberi banyak metode dalam mengembangkan inovasi, Pergeseran perguruan tinggi sudah masuk ke dalam era entrepreneurship dimana kuncinya adalah komersialisasi, Kolaborasi sangat penting terutama bagaimana R&D membangun industri dalam membangun produk – produk Alpalhankam. Dengan demikian, untuk menjaga agar siklus

ekosistem industri pertahanan ini dapat berjalan dengan baik maka produk Alpalhankam yang sudah jadi pun harus bisa terjual dan dipakai oleh user. Sehingga bisa diketahui indeks pencapaian atau kesuksesan dari produk Alpalhankam yang sudah dikembangkan tersebut apakah laku di pasar atau tidak.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, karena sudah berjalan dengan Permenperin No. 16 tahun 2011 yang menjadi dasar hukumnya. Namun pada saat ini kemampuannya menurun dikarenakan masa pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga berpengaruh juga terhadap perekonomian nasional.

Strategi ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam yang dapat dilakukan adalah melakukan sinkronisasi antar tier supaya bersinergi antara BUMN dan BUMS sehingga harapannya dapat memperbanyak bentuk kerjasama dan kolaborasi. Mempertemukan dan kordinasi antar perusahaan industri pertahanan akan terus didorong sehingga

menimbulkan harmonisasi antara industri pertahan dengan user yang diharapkan dapat membangun suatu permintaan yang lebih banyak dari dalam negeri dan menciptakan rasa kepuasan user dengan indikator pertambahan jumlah permintaan produk. Meningkatnya jumlah produk dan penguasaan teknologi yang didorong dengan bentuk kerjasama asing bertujuan untuk membatu menurunkan current account deficits. Melalui penerapan strategi diatas, diharapkan pada masa pandemi Covid-19 ini kegiatan industri pertahanan tetap dapat berlangsung, yakni dengan menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dalam negeri lainnya sehingga berdampak pula terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mendukung perekonomian nasional.

Penelitian ini membuktikan bahwa teori industri pertahanan, ekosistem industri pertahanan, teori strategi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Alpalhankam dan perekonomian nasional dapat dijadikan sebagai pisau bedah untuk membahas kajian strategi ekosistem industri pertahanan untuk memenuhi TKDN Alpalhankam guna mendukung perekonomian nasional di

masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan diharapkan dapat memperkaya bidang pendidikan dan pengembangan.

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam mengambil keputusan. Terutama untuk mewujudkan konsep triple helix serta meningkatkan 3 pilar industri industri pertahanan dalam meningkatkan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Selain itu, peneliti juga merekomendasikan bentuk ofset yang ada dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan perguruan tinggi. Bentuk ofset yang berupa transfer of technology (TOT) yang biasanya dilakukan untuk pengetahuan pembelian barang dapat dialihkan ke perguruan tinggi dengan tujuan memperkaya ilmu baru sehingga lebih bermanfaat untuk kedepannya

#### Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bappenas. (2020). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II 2020*. ISSN 2580 – 2518. Vol. 4. No. 2. Agustus 2020.

Ma'ruf, A., L. Wihastuti. (2008). *Petumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. *Jurnal*

*Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 9. No. 1. Hal. 44 – 55.

Miles, M. B., Huberman A. M., & Saldana, J (2014). *Qualitative Data Anallysis A Methodes Sourcebook*. Sage Publications. California.

Santoso, H. (2014). *Rekayasa Ekologi Industri dalam mendukung pembangunan Agro Eco-Industrial Park Skala Pedesaan*. *Jurnal Undip*. Vol. IX. No. 2. Hal. 117 – 124.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Todaro, Michael, P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development*. UK: Pearson Education Limited.

Wibowo, R D. (2016). *Permasalahan dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan*. *E-Journal*. Vol. 1. No. 2. Hal. 43 – 48.

#### Lampiran

Pertanyaan wawancara

Aspek	No	Pertanyaan
Industri Pertahanan	1	Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan dilihat dari sisi pengguna sebagai bagian dari tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam?
	2	Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan dilihat dari sisi pemerintah sebagai bagian dari tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam?

	3	Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan sebagai bagian dari tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam?
Ekosistem Idhan	4	Bagaimanakah aliran energi yang terjadi dalam ekosistem industri pertahanan dalam menciptakan produk pertahanan?
	5	Bagaimanakah kondisi SDM yang terjadi dalam ekosistem industri pertahanan dalam menciptakan produk pertahanan?
	6	Bagaimanakah implementasi ekosistem industri pertahanan pada industri pertahanan hulu dalam mendukung kemandirian dan pemenuhan TKDN Alpalhankam?
	7	Bagaimanakah implementasi ekosistem industri pertahanan pada industri pertahanan hilir dalam mendukung kemandirian dan pemenuhan TKDN Alpalhankam?
TKDN	8	Bagaimanakah ketersediaan bahan dalam TKDN dalam Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	9	Bagaimanakah ketersediaan alat kerja dalam TKDN dalam Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?

	10	Bagaimanakah ketersediaan tenaga kerja dalam TKDN dalam Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
Alpalhankam	11	Bagaimanakah kondisi Alpalhankam terkait pemenuhan TKDN di dalamnya untuk mendukung perekonomian nasional?
	12	Bagaimanakah kondisi Alpalhankam terkait pemenuhan TKDN di dalamnya di tengah masa pandemi covid-19?
Perekonomian Nasional	13	Bagaimanakah kebijakan fiskal pemerintah terkait pembelian pemerintah dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	14	Bagaimanakah kebijakan fiskal pemerintah terkait transfer dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	15	Bagaimanakah kebijakan fiskal pemerintah terkait struktur pajak dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
Strategi	E	Bagaimanakah kondisi ekosistem industri pertahanan yang diharapkan di tengah masa pandemi covid-19?
	M	Bagaimanakah ketersediaan sumber daya ekosistem industri pertahanan dalam

		memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19?
	W	Bagaimanakah strategi yang dipersiapkan oleh KKIP/Pothan/Bappenas/ Kemenperin dalam mendukung ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19?
		Bagaimanakah strategi kebijakan fiskal pemerintah terkait pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19?